

# Jadwal Sholat

SUGIH	06.09	Kawed, Noho, Karanganyar - 1 mesjid
DAMRI	12.29	As Bengkulu - 1 mesjid, Subang - 1 mesjid, Samarinda - 1 mesjid, Mataram - 2 mesjid, Pekanbaru - 1 mesjid, Banjarmasin - 2 mesjid, Semarang - 1 mesjid, Singkawang - 1 mesjid, Balikpapan - 1 mesjid, Sel-Utara - 1 mesjid
ASHAR	15.33	
MASBIRAH	18.32	
SYAFA	18.41	



## teras UTAMA

■ EFA YONNEDI  
Dosen Fakultas Ekonomi  
Universitas Andalas

### "Sovereign Rating" Indonesia Membuat Terus?

MENGAKHIRI tahun 2011 dan mengawali tahun 2012, Indonesia (setidaknya pemerintah dan pelaku pasar) mengalami sebuah euphoria luar biasa dengan naiknya peringkat Indonesia menjadi negara layak investasi (*investment grade*). Kesempatan ini semakin digunakan pemerintah untuk membuat kampanye dan iklan di televisi jaringan internasional. Saya melihat beberapa hari lalu pemerintah mengantarkan betapa menjanjikan berinvestasi di Indonesia di jaringan televisi BBC London. Intinya, iklan tersebut memberi pesan Indonesia "menjanjikan" mengingat adanya bonus demografi, sumber daya alam melimpah dan trahisasi demokrasi yang relatif stabil.

■ Baca Sovereign... Hal 7

# "Sovereign Rating" Indonesia Membuat Terus?

Sambungan dari hal. 1

Peringkat layak investasi ini diperoleh setelah 14 tahun menunggu. Secara sederhana *sovereign rating* menggambarkan kemampuan dan kemauan (*willingness*) suatu negara yang diperlukan untuk membayar utangnya (baik pokok ataupun bunga pinjamannya). Sebagian besar peringkat didasarkan pada kemungkinan gagal bayar (*probability of default*) suatu negara atau korporasi ketika utangnya jatuh tempo. Lembaga pemerintah melakukan penilaian terhadap faktor solvensi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar utang dan juga faktor sosial-politik yang akan mempengaruhi kemauan (*willingness*) untuk membayar utang tersebut.

Kemperhatian hal ini, berarti *sovereign rating* berkaitan dengan estimasi kemampuan dan keinginan negara untuk membayar pokok dan bunga utangnya pada saat jatuh tempo. Kesanik peringkat tentu berdampak terhadap *cost of borrowing* yang mestinya semakin rendah. Dengan teori keuangan sederhana dapat kita katakan bahwa entitas akan cenderung menggunakan utang dibanding ekuitas untuk mendanai bisnisnya pada saat biaya utang cenderung menurun. Namun, pada kesempatan ini bolehlah kita mengajukan pertanyaan sedikit nakal, misalkan bagaimana transparansi lembaga yang melakukan rating tersebut? Bagaimana sebaiknya mengambil kebijakan menyikapi kenaikan *sovereign rating*?

Peringkat (*rating*) dilakukan industri pemerintah internasional yang serunya adalah organisasi komersial untuk memupuk keuntungan. Setiap entitas yang beroperasi untuk mencari keuntungan sudah jelas akan memperhatikan keberlanjutan entitasnya. Pendapat terbesar lembaga *rating* berasal dari *fee* yang dipungut dari negara atau korporasi yang akan diberi peringkat. Moody's sebagai salah satu lembaga *rating* utama dunia misalnya, memungut *fee* sekitar USD 1.500 sampai dengan USD 2,5 juta untuk jasa penilaian (*appraisal*) dan pemeriksaan. Fitch Ratings International dalam publikasi resminya memungut *fee* sekitar USD 1.000 sampai dengan USD 750.000 untuk setiap kali penerbitan peringkat. Data Fitch ini adalah tahun 2002, bisa dipastikan sekarang tentu lebih mahal. Kita jarang mendapatkan informasi berapa misalkan Indonesia memborong atas *rating* yang telah diterbitkan oleh berbagai lembaga *rating* domisili.

Korporasi di Indonesia yang mendapatkan *rating* dari lembaga *rating* dunia juga tidak mencantumkan dalam laporan tahunan (*annual report*) berapa *fee* yang mereka bayar kepada lembaga *rating* tersebut. Meskipun ada beberapa lembaga yang diterbitkan. Memang tidak ada kewajiban. Lembaga *rating* juga jarang mengungkap *fee* yang mereka terima atas jasa *appraisal* dan pemeriksaan yang mereka berikan. Transparansi lembaga *rating* ini pernah digugat oleh beberapa kalangan. Jika perusahaan sekarang diminta untuk mengungkapkan (*disclose*) *fee* audit yang mereka bayar, sejawarnya juga entitas dituntut untuk mengungkapkan *fee* yang dikeluarkan untuk *appraisal* dan pemeriksaan.

Kembali ke *sovereign rating* Indonesia. Hasil *sovereign rating* Indonesia oleh masing-masing lembaga pemerintah internasional mengalami peningkatan (*upgrade*). Fitch Ratings memperingkat Indonesia BBB dengan *outlook* stabil pada akhir tahun 2011. Moody's Investor Services mengeluarkan peringkat Indonesia pada Januari 2012 dengan *rating* Baag yang bermakna stabil. Standard & Poor's menilai dan mempertahankan Indonesia dengan peringkat BB+, maknanya *outlook* positif. Japan Credit Rating Agency mengeluarkan peringkat *sovereign* Indonesia menjadi BBB dengan *outlook* stabil dan Rating & Information Inc mempublikasikan peringkat Indonesia dengan BB+ yang bermakna positif. Kesimpulannya hasil *sovereign rating* Indonesia menunjukkan prediksi positif dan stabil alias kemampuan dan kemauan Indonesia untuk membayar pokok dan bunga pinjaman diprediksi stabil dan positif.

Bisa diprediksi, utang pemerintah akan mengalami peningkatan di masa yang akan datang. Investor pun sudah berani membeli obligasi pemerintah bertenor 30 tahun. Tidak masalah pemerintah menambah utang selama digunakan untuk pengeluaran modal atau *capital expenditure* dan rasio utang terhadap PDB masih dijaga dengan hati-hati. Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah proporsi beban bunga tidak boleh melebihi 10 persen dari pendapatan domestik neto. Kalau rasio hutang kita saat ini masih relatif aman di angka sekitar 26 persen dari PDB.

Bank Sentral Uni Eropa pernah melakukan kajian mendalam terhadap faktor apa yang menentukan hasil *sovereign rating* terhadap 130

negara dengan mempelajari data hasil *rating* selama 35 tahun (periode 1970 - 2005) yang dikeluarkan oleh tiga lembaga *rating* utama: Moody's, Fitch Rating dan Standard & Poor. Tiga lembaga *rating* tersebut membuat *rating* berbeda-beda berdasarkan *fee* yang diterbitkan. Hasil kajian Uni Eropa bisa ditebak bahwa determinan utama penentu *sovereign rating* suatu negara adalah pendapatan per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri pemerintah, cadangan devisa, dan sejarah gagal bayar. Menariknya adalah menjadi anggota Uni Eropa juga meningkatkan peringkat *rating* negara tersebut.

Apakah perbaikan *sovereign rating* menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi suatu negara? Jawabannya ternyata tidak sejauh. Sebuah kajian dilakukan oleh Kiran Resources (2011) menyimpulkan Amerika Serikat yang mendapat peringkat *sovereign rating* paling tinggi (AAA) mengalami kemunduran dalam ekonomi domestiknya berupa melambatnya pertumbuhan, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pertumbuhan pasar perumahan dan pasar modal yang gonjeng ganjing. Jepang dengan *sovereign rating* AA sedikit di bawah USA juga mempertahankan hal serupa terutama pengalaman deflasi signifikan dalam beberapa tahun belakangan.

Pada level korporasi misalnya, para analis ramai menggunakan lembaga *rating* internasional ketika krisis *subprime* tahun 2008 yang membuat panik para investor. Orang-orang menyalaikan lembaga *rating*. Para investor menyandarkan diri pada kenyamanan peringkat utang AAA entitas yang mengelurkan produk cukup kompleks. Banyak kasus perusahaan yang mendapat peringkat layak investasi (*investment grade*) pada akhirnya bankrot. Ada juga kasus obligasi yang tadinya mendapat peringkat AAA pada akhirnya gagal bayar. Sebagai contoh Standard & Poor's mempertahankan peringkat layak investasi terhadap MF Global sampai pada hari keputusannya (Bloomberg News 8 Februari 2012).

Kalau peringkat terhadap korporasi oleh lembaga *rating* sudah banyak digugat, akankah kita mudah saja menerima hasil *rating* yang sudah diterbitkan untuk Indonesia dengan segala masalah domestik yang kita ketahui bersama? Hasil *rating* oleh lembaga pemerintah juga sudah mulai banyak digugat, terutama di Eropa. Pada level negara, contohnya tidak sulit untuk mencari sekarakar. Lihat saja krisis kesuksesan yang dihadapi Yunani, diikuti Irlandia, Portugal dan Spanyol. Bukanlah

*sovereign rating* sebelum krisis bank-bank saja atau sektor AAA ke A? Bukanlah mereka sekarang selang terserik-seok dengan defisit anggaran sangat tinggi? Ini yang menyebabkan banyak mengatakan lembaga *rating* tidak mengungkap sesuatu.

Tidak, meskipun demikian kondisi riil yang terjadi membuat kita perlu sedikit berhati-hati menilainkannya. Tidak ada yang salah jika lembaga pemerintah memungkinkan *rating* jasa yang diberikan oleh perusahaan atau negara yang meminta untuk diberi peringkat. Hanya ada kritik Jonathan Weil di Bloomberg News (8 Februari 2012) yang mengatakan bahwa industri pemerintah termasuk model bisnis yang mengandung terjadi "korupsi" dan "lakukannya". Gunther Tichi di Interconomics 2011 bahkan sampai mengatakan bahwa tiga besar lembaga *rating* Moody's, S&P dan Fitch Rating sebagai lembaga yang misterius, *opaque* dan sangat *powerful*. Lembaga pemerintah biasanya dibayar oleh penerbit sekuritas yang dinilai peringkatnya, atau perusahaan pemerintah dibayar oleh pihak-pihak yang paling berkepentingan seperti perusahaan penjamin emisi di bursa efek. Konflik kepentingan dan penilaian yang tidak tepat bisa saja terjadi. Yang diperlukan sebenarnya adalah transparansi lembaga pemerintah ketika menyeimbangkan peringkat suatu negara atau entitas korporasi.

Tidak perlu euphoria luar biasa dengan kenaikan peringkat Indonesia tersebut karena pada dasarnya peringkat tersebut hanya prediksi atau rincian tentang kemampuan dan kemauan kita dalam membayar utang. Kita tidak boleh lupa bahwa kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara lembaga *rating* dengan entitas yang menerima jasa *appraisal* dan pemeriksaan peringkat itu besar.

Pertanyaan mendalam yang perlu dijawab adalah, setelah kita mendapatkan peringkat layak investasi, terus apakah membangun investor di pasar modal tidak akan banyak membalik kondisi ekonomi jika kita tidak berbenah memperbaiki infrastruktur, birokrasi yang lebih efisien dan kinerja logistik. Kalau pasar modal semakin bergairah dengan investasi portofolio, ini tidak selalu berarti "pasar rakyat" akan bergairah juga. Perbaikan *sovereign*, malah sebenarnya adalah biaya utang cenderung menurun dan ini tidak berarti biaya keseluruhan untuk berusaha/berbisnis menurun. Tapi, memang perlu digarisbawahi bahwa sudah lazim negara-negara di dunia tidak menyukai berita buruk ketika *sovereign rating*nya diturunkan (*downgrade*). C